

Revitalisasi Institusi Kepolisian

ALFITRI

Lektor pada Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Sumatera Selatan



Masih terganggu dalam ingatan kita, tragedi yang menimpa mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makasar, 'diserbu' oleh aparat kepolisian masuk kampus dengan kekuatan bersenjata, secara membabi buta melakukan tindak kekerasan terhadap anak bangsa, sehingga mengakibatkan sedikitnya dua mahasiswa luka tembak dan 84 mahasiswa lainnya mengalami luka-luka serius. Kejadian yang diawali dari gerakan demonstrasi mahasiswa yang simpatik terhadap Abu Bakar Ba'asir, berlanjut dengan penyanderaan anggota polisi oleh mahasiswa, kemudian mendapat reaksi solidaritas sesama anggota polisi yang langsung melakukan penyerangan terhadap mahasiswa di kampus.

DILIHAT dari tayangan televisi yang diliput oleh beberapa televisi swasta, sangat jelas jika polisi memperlakukan mahasiswa seperti sekelompok penjahat, dipukuli, dicokok dengan senjata, bahkan ada diantaranya kaum perempuan yang ikut digiring, suatu tindakan keji yang tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat polisi yang selama ini mendengungkan semboyan pelayanan dan pengayom masyarakat. Di mana letak pengayom masyarakat jika masyarakat mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat bangsa, tanpa ada rasa kemausiaan, oknum anggota polisi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kejadian itu memberikan gambaran bahwa budaya kekerasan belum bisa dihapuskan dalam paradigma Kepolisian Republik Indonesia.

Budaya Kekerasan Aparat
Lembaran hitam kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, masih menyisakan trauma yang mendalam. Sebut saja misalnya tragedi semanggi yang menelan empat korban mahasiswa tewas diterjang peluru tajam aparat, sehingga menggulirkan reformasi di negeri ini. Peristiwa bentrok aparat dengan mahasiswa pada saat persidangan Akbar Tanjung juga berakhir dengan kekerasan. Terakhir, peristiwa yang menimpa mahasiswa UMI justru lahir pada saat Polri dinggap sebagai institusi yang mulai disegani masyarakat karena berbagai prestasi yang diraih aparatnya, tak pelak lagi seakan "menampar" Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri dan lembaga Polri itu sendiri.

Mengapa kekerasan masih menyelimuti perilaku aparat kepolisian? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena bicara budaya kekerasan yang dilakukan oknum aparat akan sangat rumit dan kompleks. Kepolisian yang merupakan alat negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (*kantibmas*), justru bertindak berlebihan dalam mengatasi dan mengendalikan berbagai bentuk demonstrasi, baik yang dilakukan mahasiswa ataupun kelompok masyarakat lainnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di lapangan seringkali dipengeruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertama, perilaku aparat yang belum bisa bertindak profesional dalam mengendalikan massa, sehingga mudah terpancing oleh berbagai bentuk isu dan tindakan para demonstran. Profesional Polri terus diuji dalam setiap kesempatan jika berhadapan dengan para pendemo. Kedua, perilaku aparat yang belum bisa melepaskan "baju militer" walaupun sudah berpisah secara institusi, namun budaya militeristik masih melekat pada oknum perilaku aparat tertentu, sehingga dalam mengambil tindakan penertiban dan pengendalian massa masih menggunakan cara-cara yang dikategorikan tindakan kekerasan. Ketiga, aparat polisi dilapangan seringkali terpancing oleh provokasi yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang menginginkan terjadinya "chaos" antara aparat dan pendemo, dalam kondisi seperti ini, biasanya oknum aparat secara situasional mengambil tindakan yang kadang kala diluar perintah atasan.

Budaya kekerasan aparat kepolisian jika ditilik dari berbagai peristiwa yang terjadi selama ini, memang sangat tergantung oleh karakteristik kelembagaan Polri itu sendiri. Artinya, institusi Polri belum mampu merubah perilaku aparatnya yang harus "cerdas" dalam menghadapi setiap ancaman terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, karena sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tidak tepat jika harus menggunakan kekuatan bersenjata dalam mengendalikan massa

yang "tidak menggunakan senjata". Apalagi tindakan itu dilakukan terhadap para mahasiswa di dalam kampus. Wajar jika Kapolri mengambil tindakan tegas terhadap para pimpinan dan oknum aparat yang terlibat tindakan kekerasan, karena memang perilaku aparat sudah diluar batas kemanusiaan, bahkan di tengah proses pemeriksaan sejumlah polisi yang terkait kasus penganiayaan mahasiswa UMI Makasar, Komisi Nasional Hak-hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan hasil investigasi awal yang berkesimpulan aparat kepolisian terindikasi melakukan pelanggaran HAM berat (Sumeks, 16 Mei 2004).

Gerakan Moral Mahasiswa

Kasus mahasiswa UMI merupakan salah satu dan sekian banyak kasus demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Sudah menjadi ciri gerakan mahasiswa dilakukan dengan cara unjuk rasa dengan mengedepankan cara-cara yang beradab dan santun, yang merupakan bagian dari gerakan moral untuk mengontrol jalannya pemerintahan yang berkuasa. Ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan arogansi pemerintah selalu dijawab melalui gerakan moral yang digalng dalam bentuk demonstrasi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan calon pemimpin bangsa di masa depan, harus peka terhadap semua permasalahan yang timbul di negeri ini, sebagai salah satu bentuk sumbangsih mahasiswa dalam pembangunan bangsa. Namun semua yang dilakukan mahasiswa selayaknya dilakukan dalam koridor kemanusiaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Jika hal ini dilakukan benturan terhadap aparat bisa dihindari, karena masing-masing pihak bisa mengendalikan diri.

Cara yang dilakukan para mahasiswa dalam berdemonstrasi, kadang-kadang juga melampaui batas-batas etika dan norma yang berlaku. Sebagai kaum intelektual dan calon pemimpin bangsa di masa depan, seyogyanya mereka yang berdemo mengedepankan cara-cara simpatik dan santun di mata aparat. Tidak memaksakan kehendak, dan tidak bertindak

anarkis. Realitas di lapangan sering kali terjadi benturan pada saat mahasiswa melakukan tindakan tidak terpuji seperti melakukan penyanderaan dan aksi pelembaran terhadap aparat, sehingga memancing aparat untuk membalas dengan cara kekerasan.

Revitalisasi Paradigma Polri

Sejak Polri secara kelembagaan berada di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah begitu lama, terdapat *ambiguitas* (ketidakjelasan) tanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri. Menurut Antropolog, Prof. Amri Marzali, dalam berhadapan dengan TNI, Polri terlihat tidak bergdaya, tidak dihargai, dan merasa inferior. Di sini kelihatan bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian posisi mereka sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri.

Ketidajelasan posisi legal mereka diperburuk oleh kecilnya jumlah gaji yang diterima yang berujung pada merebaknya korupsi di tubuh Polri. Seperti diberitakan harian ini beberapa tahun lalu, ada sejumlah skripsi mahasiswa PTIK yang mengungkap fenomena korupsi ditubuh Polri, sesuatu yang menarik, jika anggota polisi justru membeberkan kebobrokan institusinya sendiri. Hal ini mengindikasikan tidak semua anggota Polri yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, masih ada anggota Polri yang mempunyai hati nurani yang bersih, dan masih ada anggota polisi yang anti korupsi.

Kondisi ini diperparah oleh kecilnya anggaran Polri yang dialokasikan oleh pemerintah untuk kelancaran tugas aparat di lapangan. Anggota Polri di lapangan sering dihadapkan pada keterbatasan dana dalam menopang kegiatan operasional mereka, dan hal ini berdampak pada kinerja aparat. Ironisnya mereka di tuntut dan ditargetkan untuk mencapai kondisi masyarakat yang tertib dan aman, suatu hal yang sangat berat dicapai, dalam kondisi yang serba minim, dan serba terbatas.

Untuk membentuk tindakan

aparatus yang profesional dan tidak bententangan dengan budaya kekerasan, dibutuhkan proses panjang dan kemauan para elite Polri guna merubah cara-cara klasik yang selama ini masih dilakukan. Polisi yang dilatih dengan gaya TNI, mereka dibesarkan dengan mental dan budaya tentara, sehingga produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan Polri bukannya menghasilkan polisi sipil, tetapi justru menghasilkan polisi penindas gaya tentara. Hal ini yang harus segera diubah dan dibenahi secara bertahap, yang tentunya dimulai dari lembaga-lembaga pendidikan Polri dalam semua tingkatan.

Tuntutan akan perubahan paradigma Polri yang sudah digulir perlu direvitalisasi kembali. Artinya, gerakan Polri yang sudah mengedepankan prinsip pelayanan dan pengayom masyarakat perlu ditingkatkan kembali dan didudukkan pada aksi dalam setiap gerak dan langkah Polri. Semboyan tersebut jangan hanya dalam bentuk slogan semata, akan tetapi harus diimplementasikan pada setiap tindakan aparat polisi di lapangan pada saat mengemban tugas pengamanan.

Peran sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, memang harus dipertahankan dalam setiap perencanaan, tindakan, dan evaluasi di tubuh Polri secara komprehensif. Hal ini tentunya harus dilakukan melalui suatu kemauan bersama semua aparat mulai dari tamtama, bintara, dan perwira, dengan mengedepankan fungsi kontrol dan keteladanan pimpinan Polri, termasuk memikirkan kesejahteraan aparat kepolisian yang menjadi ujung tombak di lapangan. Hal ini sangat menentukan perubahan jiwa dan semangat aparat, agar bisa bertindak secara profesional dan mulai mengikis habis budaya kekerasan dalam setiap tugas dan kesempatan yang diembannya sebagai pelayan penegak ketertiban dan keamanan masyarakat. Masyarakat akan simpatik jika berhadapan dengan anggota polisi yang mengedepankan citra polisi yang mampu menjamin *kantibmas* dengan cara manusiawi dan humanistik. □